

**PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
INVESTASI DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



BUSOWA

OLEH

ELVISUSANTI

NO. STB/NIRM : 4594011041/9941110410033

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1999

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
INVESTASI DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
NAMA MAHASISWI : ELVISUSANTI
NO. STB/NIRM : 4594011041/9941110410033
JURUSAN : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

MENYETUJUI:

PEMBIMBING I

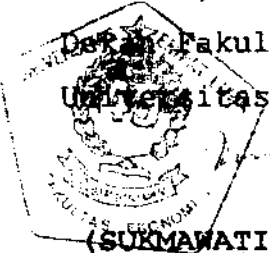
PEMBIMBING II

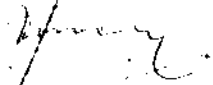

(Dra. A. HIMAYAH TAHIR, MSi)


(SYAMSUDDIN DJAFAR, SE)

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas "45"
Ujung Pandang


Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"


(SURMAWATI, SE, MSi)

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan


(MAPPIASSE, SE)

Tanggal Pengesahan :

HALAMAN PENGESAHAN

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 2 desember 1999
Skripsi atas nama : Elvisusanti
Nomor Stb. / Nirm : 4594 011 041 / 994 111 041 0033

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Jung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum :

1. Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

(Rektor Universitas "45" Ujung Pandang)

(.....) 

2. Dr. H. Djabir Hamzah, MA

(Dekan Fak. Ekonomi UNHAS)

(.....) 

Ketua : Sukmawati Marjuni, SE, Msi


(.....) 

Sekretaris : Haeruddin, SE


(.....) 

Anggota Penguji :

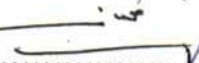
1. Dr. H. Djabir Hanzah, MA

(.....) 

2. Sukmawati Marjuni, SE, Msi

(.....) 

3. Dra. A. Himayah Tahir, Msi

(.....) 

4. Syamsuddin Djafar, SE

(.....) 

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dalam upaya menyelesaikan/memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Selanjutnya penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua di mana berkat do'a tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. A. Himayah Tahir, MSi, selaku pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Djafar SE, selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Kemudian, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang

telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, khususnya kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, selaku Rektor Universitas "45", Ujung Pandang.
2. Ibu Sukmawati SE, MSi., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45", Ujung Pandang.
3. Bapak Mappiasse SE., selaku Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas "45", Ujung Pandang.
4. Segenap Dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberi petunjuk selama penulis mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir penulisan ini.
5. Segenap keluarga dan handaitaulan yang telah banyak memberikan andil baik secara moral maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang bersifat konstruktif agar tulisan ini dapat semakin diperbaiki kualitasnya. Semoga

Allah SWT senantiasa menerima segala usaha kita sebagai salah satu amal jari-Nya.

Ujung Pandang, Juli 1999

P E N U L I S



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Penerimaan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan Pokok | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| 1.4. Hipotesis | 6 |
| BAB II. KERANGKA TEORI | 7 |
| 2.1. Landasan Pembangunan Ekonomi | 7 |
| 2.2. Peranan dan Fungsi Uang | 9 |
| 2.2.1. Sebagai satuan Pengukur nilai | 10 |
| 2.2.2. Sebagai Alat Tukar-menukar | 10 |
| 2.2.3. Sebagai Alat Penimbun | 11 |
| 2.3. Nilai dan Klasifikasi uang | 11 |
| 2.3.1. Nilai Uang | 11 |
| 2.3.2. Klasifikasi Uang | 12 |
| 2.4. Teori Tingkat Suku Bunga | 19 |
| 2.4.1. Pengertian Umum | 19 |
| 2.4.2. Fungsi Tingkat Bunga Dalam Perekonomian | 23 |
| 2.4.3. Kurva Berbagai Kesempatan Melakukan Investasi | 25 |

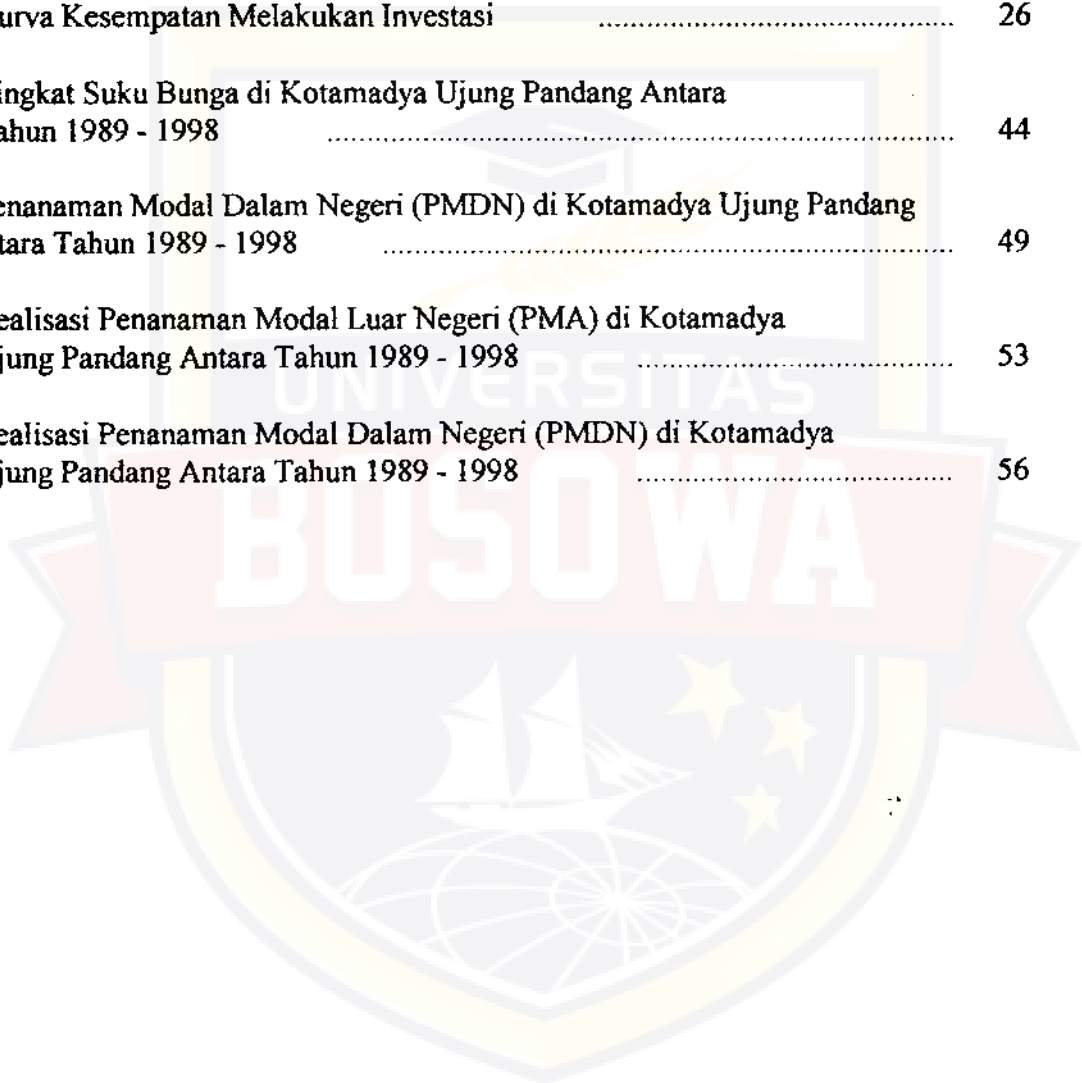
| | |
|--|-----------|
| 2.5. Investasi | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian | 29 |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 30 |
| 3.4. Metode Analisis | 31 |
| BAB IV PEMBAHASAN MASALAH | 33 |
| 4.1. Struktur dan Kebijakan Moneter | 33 |
| 4.1.1. Fungsi Bank Sentral | 36 |
| 4.1.2. Instrumen Kebijakan Moneter | 36 |
| 4.2. Analisa Tingkat Suku Bunga di Kotamadya Ujung Pandang antara Tahun 1989-1998 | 38 |
| 4.3. Analisa Pertumbuhan Investasi di Kotamadya Ujung Pandang antara Tahun 1989-1998 | 45 |
| 4.4. Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Investasi Di Kotamadya Ujung Pandang Anantara Tahun 1989 - 1998 | 56 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1. Simpulan | 62 |
| 5.2. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Teks | |
| 1. Klasifikasi Uang | 13 |
| 2. Posisi Tabungan pada Bank Umum di Kotamadya Ujung Pandang Menurut Jenis Tabungan Antara Tahun 1989 - 1998 | 40 |
| 3. Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum Antara Tahun 1989 - 1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Persen/Tahun) | 43 |
| 4. Posisi Kredit Investasi Dalam Rupiah Menurut Sektor-sektor Industri di Kotamadya ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1998 (Milyar Rupiah) | 46 |
| 5. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989 - 1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar Rupiah) | 48 |
| 6. Proyek-proyek Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) Yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989 - 1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar Rupiah) | 51 |
| 7. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri (PMDN/PMA) Yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989 - 1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar Rupiah) | 54 |
| 8. Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi di Kotamadya Ujung Pandang Periode 1989 - 1998 | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Teks | |
| 1. Kurva Kesempatan Melakukan Investasi | 26 |
| 2. Tingkat Suku Bunga di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1998 | 44 |
| 3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kotamadya Ujung Pandang Atara Tahun 1989 - 1998 | 49 |
| 4. Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1998 | 53 |
| 5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1998 | 56 |



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan di bidang investasi merupakan bagian integral dari kebijaksanaan ekonomi makro yang senantiasa diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian pemerintah senantiasa mengupayakan kebijaksanaan yang mendukung bidang investasi tersebut agar dapat berjalan serta saling mendukung dengan sektor lainnya sehingga serasi dan seimbang.

Salah satu kebijaksanaan yang paling penting dalam mendukung hal tersebut, adalah kebijaksanaan di sektor moneter dengan berbagai rangkaian penyesuaian khususnya dalam menghimpun dana guna membiayai kegiatan investasi, di mana dana yang dibutuhkan untuk membiayainya adalah cukup besar sehingga diharapkan peranan masyarakat yang semakin meningkat melalui pendapatannya yang disimpan dalam bentuk dana ideal atau dana yang tidak produktif dengan menabung di lembaga-lembaga keuangan dan pihak lembaga keuangan tersebut akan menyalurkannya

kepada para peminjam atau investor yang membutuhkan dana tersebut.

Oleh karena itu dikeluarkan beberapa kebijaksanaan di bidang moneter yang memberikan perubahan penting di sektor finansial, antara lain kebijaksanaan 1 Juni 1983 atau harga berupa bunga, sedang untuk mempertemukan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana terkadang menemui kesulitan sehingga transaksi pemindahan hak penggunaan dapat diatur dengan sistem manajemen bank sebagai lembaga perantara yang menghubungkan antara pihak pemilik dana dengan pihak investor. Dengan demikian akan tercipta suku bunga antara penabung (deposan dengan pihak bank sebagai pengelola dan bunga keseimbangan antara peminjam atau investor) dengan pihak bank. Pada prinsipnya beban bunga yang timbul pada pihak bank digeser kepada pihak investor yang menggunakan dana tersebut.

Seseorang yang mempunyai pendapatan yang besar (pemilik modal) pada waktu suku bunga tinggi kemungkinan akan lebih cenderung untuk menabung

pendapatannya di bank dari pada melakukan kegiatan investasi. Begitu pula jika seorang investor harus meminjam dari suatu lembaga keuangan dalam keadaan suku bunga tinggi, maka ia akan bertindak hati-hati dan penuh perhitungan, apakah akan menjalankan usahanya dengan keuntungan yang relatif sedikit dibandingkan beban bunga kredit yang dibayarnya ataukah mengurangi kegiatan investasinya. Hal inilah yang pada umumnya menyebabkan suku bunga memiliki sifat yang berlawanan dengan pertumbuhan investasi.

Pada umumnya besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga. Hal ini berarti semakin tinggi suku bunga, kecenderungan untuk berinvestasi akan menurun. Sebaliknya apabila suku bunga rendah, investor tertarik menanamkan investasinya dengan meminjam dana kredit perbankan. Karena itu kebijaksanaan yang praktis dan fleksibel dalam kaitannya dengan suku bunga sangat diperlukan terutama ketika negara Indonesia dihadapkan pada era globalisasi dan pasar bebas di bidang perdagangan yang memerlukan

percepatan dalam investasi, termasuk Sulawesi Selatan khususnya Kotamadya Ujung Pandang yang merupakan bagian integral negara Indonesia yang berada di kawasan yang berusaha mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah yang berada di kawasan barat Indonesia yang telah lebih dahulu maju/berkembang dengan menggalakan penanaman modal (investasi). Sulawesi Selatan khususnya Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang diharapkan dapat sejajar dengan daerah-daerah lain dalam pembangunan ekonomi, serta dalam rangka mengantisipasi suasana yang semakin kompetitif yang memerlukan peranan kebijakan dalam investasi serta kebijakan lain khususnya kebijakan moneter dalam hal ini penyesuaian suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan guna menyerap dana masyarakat yang tidak produktif sehingga perkembangan penanaman modal (investasi) dapat terlaksana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini sebagai rencana penulisan Tugas Akhir dengan judul:

"Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi di Kotamadya Ujung Pandang".

1.2. Permasalahan Pokok

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

"Sejauh mana tingkat suku bunga mempengaruhi investasi di Dati II Kotamadya Ujung Pandang".

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar keeratan hubungan antara tingkat suku bunga terhadap investasi yang terealisasi di Kotamadya Ujung Pandang.
2. Untuk mengetahui ketergantungan investasi terhadap tingkat suku bunga yang berlaku selama periode pengamatan di Kotamadya Ujung Pandang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini dimaksudkan adalah untuk :

1. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi khususnya pemerintah dalam menciptakan, mengawasi serta menstabilkan perekonomian secara makro.
2. Sebagai suatu media untuk melatih diri dalam menulis karya ilmiah.
3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45", Ujung Pandang.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, masalah pokok dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diketengahkan suatu hipotesis sebagai gerak acuan dalam rencana penelitian ini sebagai berikut: "Diduga bahwa, peranan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang cukup besar dan bersifat negatif terhadap perkembangan investasi di Kotamadya Ujung pandang.

II. KERANGKA TEORI

2.1. Landasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia telah menunjukkan profil wilayah yang menarik dalam bidang kependudukan dan kegiatan ekonominya. Tujuan dan cita-cita ekonominya dirumuskan dan disusun dalam suatu rencana dan program-program pembangunan.

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan haruslah dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya partisipasi aktif seluruh rakyat sangat menentukan, di mana berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau dalam menerima hasil-hasil pembangunan tersebut.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memuat bahwa sasaran utama pembangunan jangka

panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang tercermin pada pasal 33 UUD 1945. Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Sedangkan pembangunan di bidang lainnya dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi yang dimaksud.

Pembangunan di bidang ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang karena dengan adanya peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, maka dengan sendirinya akan tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Sejumlah negara-negara berkembang yang sedang membangun, termasuk Indonesia telah melaksanakan tahapan perkembangan ekonominya akan

tetapi negara-negara tersebut menghadapi kendala-kendala, yaitu memiliki beberapa daerah metropolitan yang berkembang pesat tetapi di lain pihak juga memiliki daerah hinterland yang sangat primitif. Wilayah-wilayah tersebut merupakan unsur dominan yang memiliki potensi sumber daya yang luar biasa tetapi belum dimanfaatkan seefektif mungkin, sehingga memerlukan penyediaan modal atau investasi dan keterampilan dalam jumlah besar serta skala yang lebih luas.

2.2. Peranan dan Fungsi Uang

Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang (misalnya, kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak dan sebagainya).

Dengan demikian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Satuan Pengukur Nilai
- b. Sebagai Alat Tukar-menukar, dan
- c. Sebagai Alat Penimbun.

2.2.1. Sebagai Satuan Pengukur Nilai

Sebagai fungsi ini maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, di Indonesia rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Seseorang dapat mengukur sebuah nilai mobil atau rumah dengan rupiah, bahkan dengan diketahuinya nilai rupiah dari mobil dan rumah, maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara rumah dan mobil.

2.2.2. Sebagai Alat Tukar-menukar

Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat di dalam tukar-menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar menukar barang dengan barang (barter). Dengan adanya uang keharusan adanya kesamaan keinginan

ini tidak perlu ada untuk terjadinya pertukaran. Prosesnya, barang ditukar dengan uang dan dengan uang ini dapat membeli/menukarkan dengan barang lain.

2.2.3. Sebagai alat Penimbun

Kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dalam bentuk barang, misalnya mobil, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk uang misalnya, uang kas dan surat-surat berharga. Dengan demikian seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dalam pengertian inilah uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan.

2.3. Nilai dan Kalsifikasi Uang

2.3.1. Nilai Uang

Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli (ditukarkan dengan) barang dan jasa (internal value) serta valuta asing (external value). Dengan demikian, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa.

Apabila harga barang naik, maka nilai uang akan turun, begitupun sebaliknya.

Biasanya ada tiga metode untuk mengukur nilai uang yaitu dengan menggunakan: indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar atau apa yang disebut dengan GNP Deflator.

Indeks biaya hidup umumnya banyak dipakai sebagai ukuran nilai uang. Indeks ini mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup. Di Indonesia dikenal 9 (sembilan) bahan pokok, indeks harga 62 macam barang dan sebagainya. Sedangkan indeks harga perdagangan besar merupakan indeks harga barang-barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain. GNP Deflator mencakup harga barang-barang yang lebih luas/banyak dibandingkan dengan indeks biaya hidup maupun indeks harga perdagangan besar.

2.3.2. Kalsifikasi Uang

Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda-beda, seperti misalnya:

- a. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang;
- b. Yang mengeluarkan atau mengedarkan, adalah pemerintah, Bank Sentral atau Bank Komersil;
- c. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.

Uraian akan didasarkan atas ketiga klasifikasi tersebut di atas dan untuk mudahnya akan dimulai dengan yang ketiga. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa jenis uang atas dasar klasifikasi point (c):

Tabel 1. Klasifikasi Uang

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Full bodied money b. Representatif full-bodied money c. Credit money. <p>Yang dikeluarkan oleh pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Token coins 2. Representatif token money 3. Uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. <p>Yang dikeluarkan oleh bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral 2. Demand deposit (uang giral). |
|---|

Sumber Data: Bank Indonesia, Cabang Ujung Pandang.

a. Full Bodied Money;

Full bodied money adalah uang di mana nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang.

Dikatakan di atas bahwa full bodied money itu adalah uang yang nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Ini berarti bahwa nilainya sebagai uang itu tetap (konstan), jika harga dari satu unit emas dinyatakan tetap dalam mata uang, maka tenaga beli (purchasing power) akan dibandingkan terbalik dengan harga barang lain. Tenaga beli uang emas ini akan turun separuh, apabila harga barang lain naik dua kali. Jadi meskipun harga sebagai emas tetap, tenaga belinya dapat berubah-ubah.

Tidak selalu benar bahwa nilai uang (dalam arti tenaga beli terhadap barang lain) ditentukan oleh jumlah (stock) barang (emas atau perak) yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut serta permintaan untuk penggunaan barang barang tersebut sebagai non-uang. Namun sebenarnya nilai uang ini (tenaga beli) ditentukan oleh

jumlah (stock) barang tersebut serta permintaan total (untuk penggunaan barang tersebut sebagai non-uang dan uang). Dan biasanya permintaan barang tersebut untuk digunakan sebagai uang merupakan bagian terbesar dari permintaan total tersebut.

b. Representative Full Bodied Money;

Biasanya uang jenis ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Sebenarnya uang jenis ini hanyalah mewakili (represent) dari sejumlah barang/logam di mana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Contohnya: surat emas (gold certificate) yang beredar di Amerika Serikat sebelum ditarik pada tahun 1933, yang mewakili (dengan nilai yang sama) sejumlah emas tertentu yang dipegang/disimpan oleh Kantor Bendahara sebagai jaminan sertifikat tersebut. Keuntungan sertifikat emas ini adalah sangat mudah untuk melakukan transaksi besar-besaran. Sebab, kalau transaksi besar, pembayaran dengan

emas akan mengundang resiko dalam permintaan fisik barang (emas) yang cukup besar.

c. Credit Money;

Credit Money adalah jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu nilai sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas yang kita lihat sehari-hari. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana memelihara nilai sebagai barang ini lebih rendah dari nilai sebagai uang (tenaga beli)?

Caranya dengan membatasi pembetulan/pencetakan uang. Biasanya penguasa menentukan sejumlah tertentu uang yang akan dibuat, kemudian penguasa hanya membeli bahan (barang yang digunakan untuk uang) itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat uang tersebut. Jumlah bahan yang tersisa dapat digunakan untuk tujuan lain. Jumlah sisa ini pada umumnya cukup besar sehingga harganya relatif rendah. Dengan demikian harga sebagai bahan lebih rendah daripada nilai sebagai uang.

d. Token Coins (Uang Tanda);

Jenis Uang ini berbentuk logam dengan nilai nominal (sebagai uang) lebih tinggi daripada nilai barang (nilai intrinsik). Nilai nominal biasanya biasanya lebih kecil, sebab uang jenis ini sering digunakan untuk perhitungan uang "kembali" yang biasanya merupakan pecahan kecil. Uang perak, merupakan salah satu contoh token coin.

e. Representative Token Money;

Bedanya dengan full bodied money adalah bahwa representative token money dijamin dengan logam atau coin yang nilainya sebagai barang (intrinsik) lebih rendah dari nilai nominal. Salah satu contohnya adalah "sertifikat perak" yang dikeluarkan di Amerika Serikat tahun 1878 - 1967.

f. Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Pemerintah;

Biasanya berbentuk uang kertas dan sering disebut fiat money. Kepercayaan masyarakat merupakan dasar penerimaan kertas tersebut sebagai uang. Namun masyarakat sering

mengemukakan keberatannya lantaran pemerintah dapat mencetak uang ini guna membiayai defisit anggaran belanjanya terutama pada masa perang.

g. Uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Bank Sentral;

Kebanyakan uang kertas yang beredar di masyarakat dewasa ini berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, kita dapat melihat setiap uang kertas selalu ada tulisan bank Indonesia.

h. Demand Deposit (Uang Giral)

Bagian terbesar dari jumlah uang yang beredar merupakan uang giral. Makin maju suatu perekonomian biasanya proporsi uang giral makin besar. Uang giral ini merupakan simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Uang giral ini lebih praktis sebagai alat pembayar karena:

- a) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga yang menemukan tidak dapat mencairkannya

- b) Dapat dipindahtangankan tanpa ongkos/biaya yang tinggi dan dapat dilakukan dengan cepat.
- c) Tidak diperlukan adanya uang kembali sebab cheque dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

2.4. Teori Tingkat Suku Bunga

2.4.1. Pengertian Umum

Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga atas penggunaan uang, atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu (Syamsuddin Jafar, 1993 ; 95). Naik turunnya setingkat bunga, dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang.

Dalam teori Keynes, tingkat bunga merupakan determinan utama atas investasi. Tingkat bunga memiliki sifat yang berlawanan dengan pertumbuhan investasi. Bila suku bunga turun, maka investasi cenderung meningkat. Sebaliknya bila suku bunga naik/meningkat, maka investasi cenderung menurun, sebab para pemilik dana akan lebih memilih

menyimpan uangnya di bank dengan harapan memperoleh bunga yang besar. Jadi dengan sendirinya, perubahan suku bunga akan mempengaruhi pertumbuhan investasi, selanjutnya akan berdampak pada tingkat pendapatan nasional.

Sebenarnya masalah suku bunga banyak diperbincangkan dan selalu merupakan perdebatan yang panjang dan menarik bagi ahli-ahli ekonomi diantaranya masalah arti pentingnya suku bunga bagi jalannya proses kehidupan ekonomi utamanya terhadap perkembangan ekonomi serta pencapaian pemerataan pendapatan masyarakat.

Karena pentingnya arti dari suku bunga inilah kemudian menjadikannya sebagai alat kebijaksanaan moneter di dalam percaturan ekonomi pada perekonomian suatu negara, sekaligus merupakan suatu tantangan. Apalagi untuk negara Indonesia dalam hal ini lembaga perbankan setelah era paska deregulasi justru dihadapkan pada masalah suku bunga yang tinggi, kompensasi sumber dana, menurunnya kredit investasi dan bahkan

tidak tersedianya pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

Sejalan dengan usaha-usaha pemerintah untuk peningkatan peranan sektor swasta dalam pembangunan, peranan perbankan di dalam membiayai menjadi sangat perlu, bahkan harus dominan. Hal ini dapat terlaksana dengan peningkatan fungsi efisien pelayanan, peningkatan kemampuan profesionalisme guna berjalannya fungsi dan peranan perbankan sebagai "Agen of Development" dari pemerintah.

Masalah pengendalian moneter dalam hal ini pada suatu perekonomian terbuka dengan sistem lalu lintas modal bebas memberikan dampak bahwa pemerintah mempunyai ruang gerak yang agak terbatas di dalam mempengaruhi suku bunga deposito, kegiatan investasi serta produksi melalui kebijaksanaan di bidang perkreditan, karena suku bunga deposito dalam negeri sangat ditentukan oleh suku bunga internasional, tingkat inflasi dan ekspektasi mengenai perkembangan kurs devisa dimana kebijaksanaan fiskal dan moneter

yang tepat diharapkan dapat menekan laju inflasi dan memperkecil perbedaan antara suku bunga deposito dalam negeri dengan suku bunga internasional.

Perkembangan pemikiran mengenai suku bunga sejak masa lampau hingga sekarang terus mengalami perubahan dan perbaikan, dimulai dari pendapat kaum klasik yang mengatakan; tingkat suku bunga itu sendiri ditentukan pada pertemuan antara permintaan investasi dan penawaran dana tabungan di pasar. Sedangkan kedudukan tabungan itu sendiri masih bervariasi dengan tingkat penawaran, dan tabungan adalah fungsi dari pendapatan. Bilamana pendapatan naik maka masyarakat terdorong untuk menyimpan uangnya di bank dengan harapan untuk memperoleh bunga atau harga atas penggunaan modalnya, begitu pula sebaliknya bilamana pendapatan berkurang maka akan mendorong turunnya tabungan. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Neo Klasik, tentang suku bunga yaitu "tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingkat tabungan juga keadaan teknik

dan tingkat penduduk tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingkat bunga investasi". Sebaliknya kaum moneteris berpendapat bahwa; "tingkat bunga akhirnya akan lebih tinggi dari tingkat awal alasannya pengaruh kenaikan pendapatan terhadap kenaikan suku bunga (income effect) lebih besar dari penurunan tingkat bunga sebagai akibat dari adanya kelebihan likuiditas (liquidity effect)".

Mengingat arti penting dari suku bunga sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi ekonomisnya, maka kebijaksanaan suku bunga itu perlu lebih realistis dalam pengembangannya sehingga tidak memberatkan pengembangan pembangunan juga para nasabah dan pengusaha. Oleh karena itu perlu fleksibel dalam peningkatan tingkat bunga sehingga dapat selalu menyesuaikan diri pada tiap kali terjadinya suatu perubahan.

2.4.2. Fungsi Tingkat Bunga Dalam Perekonomian

Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang harus dipecahkan oleh sistem ekonomi adalah:
pertama; berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan atau dialokasikan untuk menghasilkan

beberapa barang yang berbeda pada waktu/saat yang bersamaan. Misalnya, kayu jati gelondongan dapat dibuat untuk kayu gergajian, meja, kursi, almari atau pintu. Dalam sistem ekonomi pasar, alokasi penggunaan kayu gelondongan tersebut ditentukan oleh harga meja, kursi, almari dan pintu atau kayu gergaji.

Kedua; adalah masalah alokasi penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang akan digunakan sekarang atau di kemudian hari.

Seluruh warga masyarakat mempunyai keharusan melakukan alokasi faktor produksi untuk penggunaan sekarang dan nanti. Hanya metodenya yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ada yang mendasarkan alokasi ini pada tradisi (terutama untuk negara yang belum maju), yakni dengan menyisihkan sebagian dari hasil yang diperoleh sekarang untuk penggunaan di waktu yang akan datang. Seperti yang dilakukan di Rusia alokasi ini lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Tetapi pada sistem ekonomi pasar (seperti di Amerika Serikat), alokasi antara

sekarang dan nanti adalah hasil interaksi keputusan masing-masing individu.

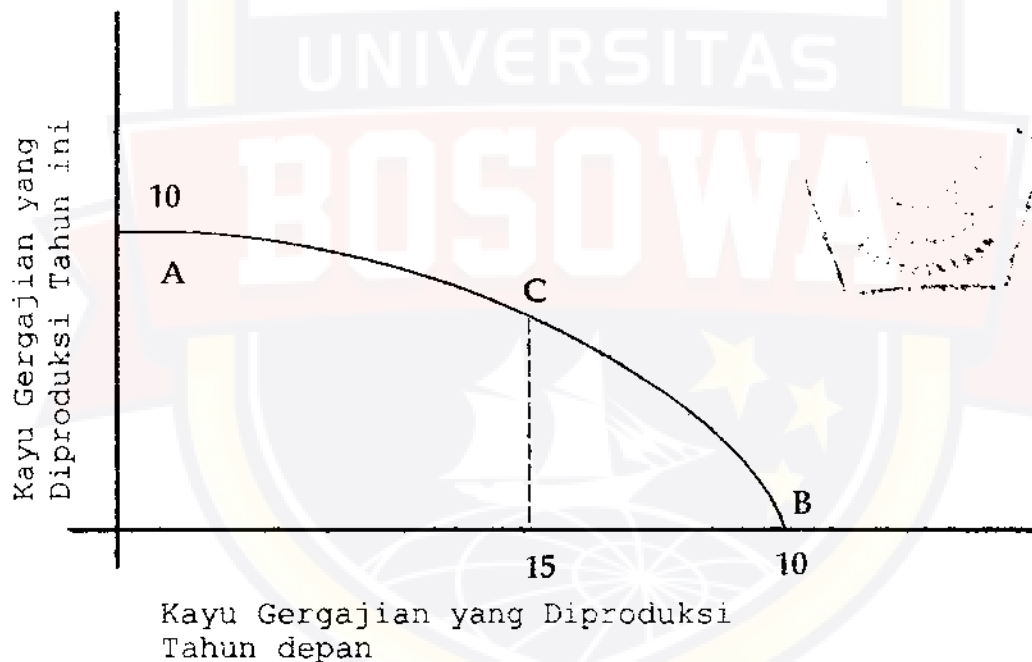
2.4.3. Kurva Berbagai Kesempatan Melakukan Investasi

Untuk mengetahui sifat masalah ekonomi di atas, akan lebih mudah dipahami apabila disertakan suatu contoh. Dengan contoh yang sederhana diharapkan prinsip-prinsip utama masalah alokasi antar waktu (sekarang dengan nanti) dapat dengan mudah dijelaskan. Misalnya suatu masyarakat yang hidup di sekitar hutan kayu jati dan hanya ada satu jenis barang yang dihasilkan, yakni kayu gergajian. Apabila masyarakat tersebut makin banyak menebang kayu jati di hutan, tahun ini, maka makin sedikit kayu jati yang akan bisa ditebang tahun yang akan datang. Namun, banyaknya kayu jati gergajian yang dihasilkan sekarang dengan tahun yang akan datang tidak satu banding satu. Artinya kalau tahun ini menghasilkan 10 kayu gergajian lebih banyak tidak berarti tahun depan produksi kayu gergajian turun dengan 10 buah. Masalah yang dihadapi masyarakat tersebut adalah penentuan jumlah pohon yang

ditebang tahun ini dan tahun depan. Dengan kata lain, masyarakat tersebut perlu menyelesaikan masalah alokasi antara jumlah produksi tahun ini dengan tahun depan.

Masalah alokasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva Kesempatan Melakukan Investasi



Apabila masyarakat tersebut menebang semua pohon dan digergaji tahun ini, maka tahun depan mereka tidak dapat menghasilkan kayu gergajian (titik A). Sebaliknya, pada titik B, tahun ini

tidak memproduksi sama sekali, berarti semua pohon ditebang tahun depan. Sedangkan titik C, sebagian dihasilkan tahun ini dan sebagian tahun depan. Bentuk kurvanya cembung dari titik 0 berarti berlaku anggapan bahwa hubungan turunnya produksi sekarang dengan naiknya produksi tahun depan tidak satu banding satu.

Dari gambar 1. ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak menebang tahun ini (tetapi menabung) berarti melakukan investasi pohon untuk produksi pohon tahun depan.

Masyarakat tersebut di atas, "harus" menentukan pilihannya, yakni titik mana dalam kurva tersebut. Ahli ekonomi sering menamakan alokatif ini sebagai pilihan waktu (time preference), yaitu menyatakan pilihan mereka antara konsumsi (penggunaan) sekarang dengan waktu yang akan datang.

2.5. Investasi

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan

penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 1994 hal. 106). Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama atau yang perlu didepresiasi.

Pada prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi atau penanaman modal (investment) diikuti oleh pengeluaran/pembelanjaan sebagai berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan waktu Penelitian

Dalam rencana penelitian ini, penulis memilih Bank Indonesia (BI) Cabang Ujung Pandang dan Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan serta Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan sebagai obyek penelitian. Sedangkan waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu pada bulan April hingga bulan Mei 1999.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, dipergunakan dua metode dalam membahas pokok permasalahan dan metode analisis yang diketengahkan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan artikel-artikel serta berbagai publikasi yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan langsung mendatangi obyek penelitian, yaitu Bank Indonesia (BI), Biro pusat Statistik (BS), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, maka pada penulisan ini digunakan data sekunder yang merupakan data berkala atau deret waktu (time series) yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berupa data suku bunga deposito serta data penanaman modal (investasi) daerah yang terealisasi di Kotamadya Ujung Pandang. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan artikel-artikel yang berguna bagi analisis pembahasan ini di mana data tersebut dapat diperoleh pada instansi obyek penelitian serta publikasi-publikasi yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

3.4. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, maka penulis menggunakan pendekatan analisis regresi linear sederhana dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

Untuk mengetahui nilai b (koefisien regresi atau slope) digunakan persamaan :

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Sedangkan untuk mengetahui hubungan dan ketergantungan pertumbuhan investasi yang terealisasi di Kotamadya Ujung Pandang terhadap perubahan tingkat suku bunga, maka digunakan persamaan koefisien korelasi (r) sebagai alat dalam pendekatan ini, dengan rumus :

$$r = \frac{(n) \cdot (\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{(n) \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2} \sqrt{(n) (\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

Di mana :

r = Koefisien korelasi (keeratan hubungan antara kedua variabel)

Y = Jumlah investasi

X = Tingkat/suku bunga deposito perbankan (%)

n = Jumlah Sampel

a = Titik potong (intercept)

b = Koefisien regresi (slope).



IV. PEMBAHASAN MASALAH

Tabungan, menurut teori moneter klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.

Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuangan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil.

Tingkat bunga dalam keadaan seimbang tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.

4.1. Struktur dan Kebijaksanaan Moneter

Sistem moneter di Indonesia terdiri dari : Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga perbankan lainnya. Dalam periode tahun 1950-1966.

pengaturan jumlah uang yang beredar secara langsung, melalui pengaturan langsung Bank Indonesia mengenai penggunaan kredit dan aktivitas bank-bank umum. Bank-bank umum ini sebagian milik pemerintah. Semenjak 1967, pemerintah telah berusaha untuk menciptakan tata kehidupan perbankan yang mengarah pada orientasi pasar. Namun demikian masih juga terlihat adanya pengaturan secara langsung. Seperti misalnya, pengaturan kegiatan pemberian kredit oleh Bank Umum Pemerintah. BNI 1946 untuk industri pengangkutan, pertanian dan ekspor; BDN untuk ekspor dan pertambangan; BRI untuk pertanian, Bank EXIM untuk ekspor dan impor; Bank Bumi Daya untuk ekspor dan pertambangan. Pembidangan tersebut makin lama makin menjadi kabur. Peranan yang dominan dari Bank Umum pemerintah ini ditunjukkan dengan besarnya kredit yang diberikan.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga memberi beberapa macam kredit, di antaranya kredit likuiditas, kredit langsung dan kredit untuk pertamina. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan kepada bank-bank umum untuk membantu

liquiditas mereka. Kredit langsung adalah krea yang diberikan kepada Badan Pemerintah (misalnya Bulog) untuk subsidi pangan, pupuk dan untuk pengembangan industri kecil. Kredit kepada Pertamina, terutama untuk mengatasi kesulitan keuangan Pertamina pada tahun 1975-1976.

Di samping bank-bank umum (baik pemerintah maupun swasta) terdapat pula lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalnya asuransi dan lembaga-lembaga tabungan serta perkreditan. Pada tahun 1968 pemerintah mulai dengan usaha untuk mendirikan pasar modal yang ditujukan untuk meningkatkan peranan sektor moneter dalam menunjang pembangunan ekonomi. Namun demikian, lembaga-lembaga keuangan tersebut masih belum berfungsi seperti yang diharapkan.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sistem moneter di Indonesia masih sederhana. Konsekuensinya, ruang gerak penguasa moneter untuk melakukan kebijaksanaan di bidang moneter juga relatif terbatas.

4.1.1. Fungsi Bank Sentral

Pada dasarnya, Bank Sentral (BI) mempunyai tugas untuk memelihara agar sistem moneter itu bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit/uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bank Sentral bertanggung jawab atas 2 (dua) hal, yaitu:

1. pertama;

Merumuskan serta melaksanakan sistem dan kebijaksanaan moneter.

2. Kedua;

mengatur, mengawasi serta mengendalikan sistem moneter.

4.1.2. Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter, terutama ditujukan untuk *stabilisasi* ekonomi yang dapat

diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan serta neraca pembayaran internasional. seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan keadaan tersebut. Pada dasarnya, instrumen-instrumen kebijaksanaan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Instrumen umum, yaitu:

- Politik pasar bebas (open market)
- Politik cadangan minimum atau reserves requirements
- Politik diskonto.

2. Instrumen selektif:

3. Moral suasion (open mouth policy).

Di samping ketiga instrumen tersebut, penentuan tingkat suku bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi juga merupakan bagian dari instrumen kebijaksanaan moneter yang dipakai.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu gambaran umum bahwa kebijaksanaan moneter sangat *significant* terhadap laju pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

nasional terutama dalam upaya untuk menggalakkan investasi yang sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan perekonomian regional dan nasional yang pada gilirannya diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.2. Analisa Tingkat Suku Bunga di Kotamadya Ujung Pandang antara Tahun 1989-1998

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh industri perbankan nasional akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian yang ada. Hal ini terutama akan berpengaruh terhadap volume investasi yang terjadi. Tingginya suku bunga deposito akan menyebabkan nilai investasi akan menurun, sebaliknya apabila tingkat suku bunga yang tercipta berada pada titik keseimbangan (normal), maka umumnya para pengusaha akan berusaha untuk menarik modalnya yang ditanamkan di bank-bank (swasta maupun nasional) untuk dialihkan dalam bentuk investasi terhadap bidang-bidang usaha yang dianggap dapat mendatangkan untung yang lebih besar

dibandingkan apabila diinvestasikan dalam tabungan ataupun deposito.

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini di mana posisi tabungan masyarakat (tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tabungan berjangka maupun jenis tabungan lainnya) pada bank-bank umum yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang selama satu dekade terakhir, memperlihatkan peningkatan angka yang cukup berarti.

Sebagai contoh (tabel 7), untuk jenis tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu tercatat bahwa pada akhir tahun 1989 sampai akhir tahun 1998, jumlah deposit meningkat dari 1,103 juta deposit menjadi 1,601 juta deposit. Sedangkan investasi yang ditanamkan adalah dari 527,19 milyar rupiah menjadi sekitar 2,468 triliun rupiah pada akhir tahun 1998.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Posisi Tabungan Pada Bank Umum di Kota Ujung Pandang Menurut Jenis Tabungan Antara Tahun 1989-1998

| Periode (And of Periode) | Tabungan yang Penarikannya dapat Dilakukan Sewaktu-waktu | | Tabungan Berjangka (Saving Deposit) | | Tabungan Lainnya (Other Saving Deposit) | | Jumlah | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Pena- bung (Ribuan) | Posisi (Milyar Rp.) | Pena- bung (Ribuan) | Posisi (Milyar Rp.) | Pena- bung (Ribuan) | Posisi (Milyar Rp.) | Pena- bung (Ribuan) | Posisi (Milyar Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1989 | 1,103 | 527.19 | 18 | 2.30 | 167 | 87.96 | 1,287 | 617.44 |
| 1990 | 1,115 | 572.22 | 18 | 2.22 | 908 | 91.85 | 2,041 | 666.30 |
| 1991 | 1,040 | 472.85 | 21 | 2.30 | 183 | 100.89 | 1,244 | 576.04 |
| 1992 | 1,209 | 798.67 | 18 | 3.04 | 150 | 141.59 | 1,377 | 943.30 |
| 1993 | 1,106 | 1,136.15 | 3 | 1.93 | 385 | 180.74 | 1,494 | 1,318.81 |
| 1994 | 1,168 | 1,299.74 | 2 | 2.11 | 442 | 191.44 | 1,612 | 1,493.30 |
| 1995 | 1,281 | 1,572.41 | 6 | 2.67 | 501 | 173.96 | 1,788 | 1,749.04 |
| 1996 | 1,409 | 2,068.81 | 8 | 4.81 | 568 | 206.56 | 1,985 | 2,280.19 |
| 1997 | 1,532 | 1,957.37 | 10 | 7.67 | 609 | 177.30 | 2,151 | 2,142.33 |
| 1998 | 1,601 | 2,468.63 | 10 | 8.15 | 707 | 196.30 | 2,319 | 2,673.07 |
| Rata - rata | | | | | | | 1,730 | 1,445.98 |

Sumber Data: Bank Indonesia, Cabang Ujung Pandang.

Selain itu, tingkat bunga yang ditawarkan untuk jenis-jenis deposito juga bervariasi misalnya untuk deposito berjangka 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Adanya variasi suku bunga ini, menyebabkan masyarakat cenderung untuk memilih jenis deposito

dengan tingkat suku bunga yang paling tinggi. Namun demikian, kenyataannya selama awal tahun 1989 hingga akhir tahun 1997, tingkat suku bunga yang beredar di berbagai lembaga perbankan swasta, nasional maupun internasional tidak mengalami perubahan yang drastis dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena stabilitas perekonomian nasional pada umumnya berada dalam kendali yang prima.

Sedangkan pada sekitar pertengahan tahun 1998, di mana terjadi gejolak politik nasional yang mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan angka inflasi melonjak naik dan disusul dengan naiknya harga barang-barang di pasaran secara tidak terkendali. Hal ini berakibat pada minimnya cadangan kas pada setiap bank karena harga barang-barang meningkat yang memaksa masyarakat untuk menarik uangnya dari bank untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Efek negatif lain yang timbul dengan terjadinya krisis ini adalah kurangnya minat para investor untuk melakukan investasi pada sektor-sektor potensial baik investor domestik maupun

investor asing karena harga barang-barang di pasar sangat tinggi.

Kondisi seperti sangat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga kebijaksanaan moneterpun dikeluarkan untuk memulihkan keadaan dengan jalan menaikkan tingkat suku bunga yang mana diharapkan masyarakat tertarik untuk kembali menabung pada bank-bank yang ada. Di samping itu, tingkat suku bunga kredit untuk para investor yang bergerak di sektor-sektor potensial dan vital diperlunak dengan memberikan batas pengembalian yang lebih panjang dan beban bunga kredit diperkecil kemudian dibantu dengan mempermudah prosedur ekspor setiap hasil-hasil produksi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan investasi tetap berjalan disamping krisis yang terjadi diusahakan untuk dapat dipulihkan secepat mungkin.

Untuk mempermudah gambaran tentang keadaan tingkat suku bunga yang terjadi antara tahun 1989 hingga tahun 1998, khususnya di Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

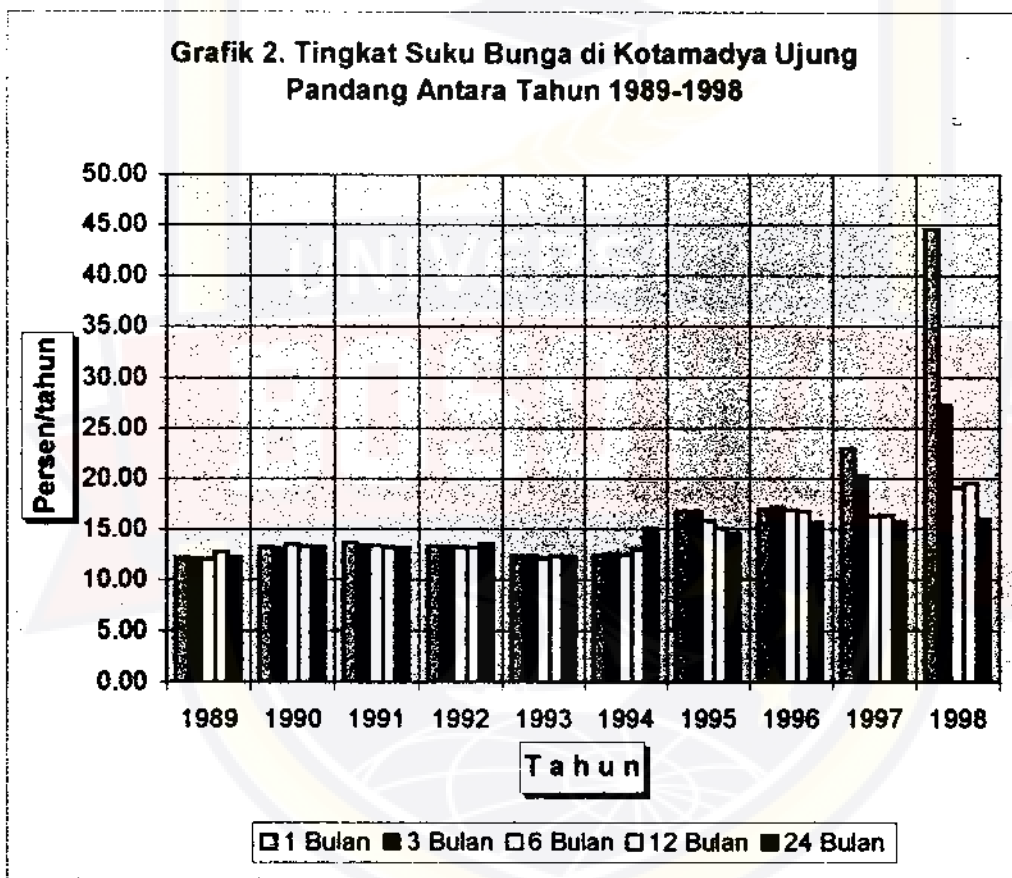
Tabel 8. Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum Antara Tahun 1989-1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Persen/tahun)

| Periode | Bank Umum | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1989 | 12.15 | 12.10 | 12.00 | 12.15 | 12.24 |
| 1990 | 13.23 | 13.05 | 13.45 | 12.24 | 13.25 |
| 1991 | 13.66 | 13.40 | 13.38 | 12.00 | 13.10 |
| 1992 | 13.31 | 13.20 | 13.18 | 12.10 | 13.55 |
| 1993 | 12.37 | 12.33 | 12.06 | 12.25 | 12.27 |
| 1994 | 12.42 | 12.54 | 12.39 | 12.99 | 15.03 |
| 1995 | 16.72 | 16.75 | 15.83 | 15.04 | 14.48 |
| 1996 | 16.92 | 17.20 | 16.90 | 16.69 | 15.63 |
| 1997 | 23.01 | 20.30 | 16.24 | 16.28 | 15.74 |
| 1998 | 44.54 | 27.26 | 19.05 | 19.50 | 16.02 |
| Rata-rata | 17.83 | 15.81 | 14.45 | 14.12 | 14.13 |

Sumber Data: Bank Indonesia, Cabang Ujung Pandang

Dari tabel 8. di atas, terlihat bahwa pada akhir tahun 1989 sampai akhir 1998, tingkat suku bunga relatif tidak mengalami perubahan yang mencolok. Sebagai contoh adalah untuk deposito berjangka 1 bulan, tingkat suku bunga selama 9 tahun tahun terakhir (1989-1997) berkisar antara 12,15% hingga 23,01%/tahun. Tetapi pada kuartal I hingga kuartal terakhir tahun buku 1998, tingkat

suku melonjak naik hingga mencapai angka 44,54%/tahun. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya *unstable* pada neraca pembayaran bank.



Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor stabilitas politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap laju/tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Terjadinya *hyper inflation* yang berkepanjangan berdampak pada meningkatnya suku bunga bank.

4.3. Analisa Pertumbuhan Investasi di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1998

Kebijaksanaan tentang penanaman modal, ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang kemudian disempurnakan dengan berlakunya masing-masing UU No. 11 dan No. 12 Tahun 1970.

Proyek-proyek PMA dan PMDN adalah proyek-proyek yang disetujui oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. Proyek-proyek yang dimaksudkan adalah proyek yang bergerak di bidang Telekomunikasi, Transportasi, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa-jasa.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Posisi Kredit Investasi dalam Rupiah Menurut Sektor-sektor Industri di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989 -1998 (Milyar rupiah)

| Periode | Telekomu- nikasi | Transpor-tasi | Perindus-trian | Perdaga-ngan | Jasa-jasa | Jumlah Total |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | Milyar Rp. | Milyar Rp. | Milyar Rp. | Milyar Rp. | Milyar Rp. | Milyar Rp. |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1989 | 124 | 13.04 | 250 | 62 | 127 | 576 |
| 1990 | 164 | 13.78 | 276 | 66 | 143 | 663 |
| 1991 | 192 | 14.78 | 311 | 82 | 159 | 759 |
| 1992 | 247 | 14.11 | 398 | 98 | 208 | 965 |
| 1993 | 291 | 7.63 | 420 | 194 | 259 | 1,172 |
| 1994 | 332 | 4.78 | 482 | 143 | 309 | 1,270 |
| 1995 | 364 | 5.81 | 568 | 184 | 478 | 1,598 |
| 1996 | 408 | 11.48 | 559 | 264 | 640 | 1,882 |
| 1997 | 460 | 15.74 | 651 | 272 | 729 | 2,128 |
| 1998 | 398 | 15.44 | 596 | 242 | 630 | 1,882 |
| Rata - rata | | | | | | 1,289 |

Sumber Data: Bank Indonesia, Cabang Ujung Pandang

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor jasa menempati urutan pertama investasi yang ditanamkan di Kotamadya Ujung Pandang di mana nilai investasi yang ditanamkan pada akhir tahun 1998 adalah sebesar 630 milyar rupiah yang disusul oleh sektor telekomunikasi dengan nilai investasi sebesar 398 milyar rupiah pada akhir tahun 1998.

Sektor lainnya adalah sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi dengan nilai investasi pada akhir tahun 1998 masing-masing adalah 596, 242 dan 15,44 milyar rupiah. Secara statistik, rata-rata investasi yang ditanamkan setiap tahunnya adalah sekitar 1,3 triliun rupiah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap tahunnya, investasi yang ditanamkan mengalami kenaikan pada setiap periode.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum iklim investasi di Kotamadya Ujung Pandang memiliki iklim investasi yang kondusif yang sehingga nilai investasi yang ditanamkan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dimaksud merupakan penjumlahan proyek-proyek baru ditambah dengan proyek PMA yang beralih status menjadi PMDN, dikurangi proyek PMDN yang dicabut izin usahanya.

Adapun proyek PMDN yang beroperasi di Ujung Pandang selama kurun waktu 1989-1998, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

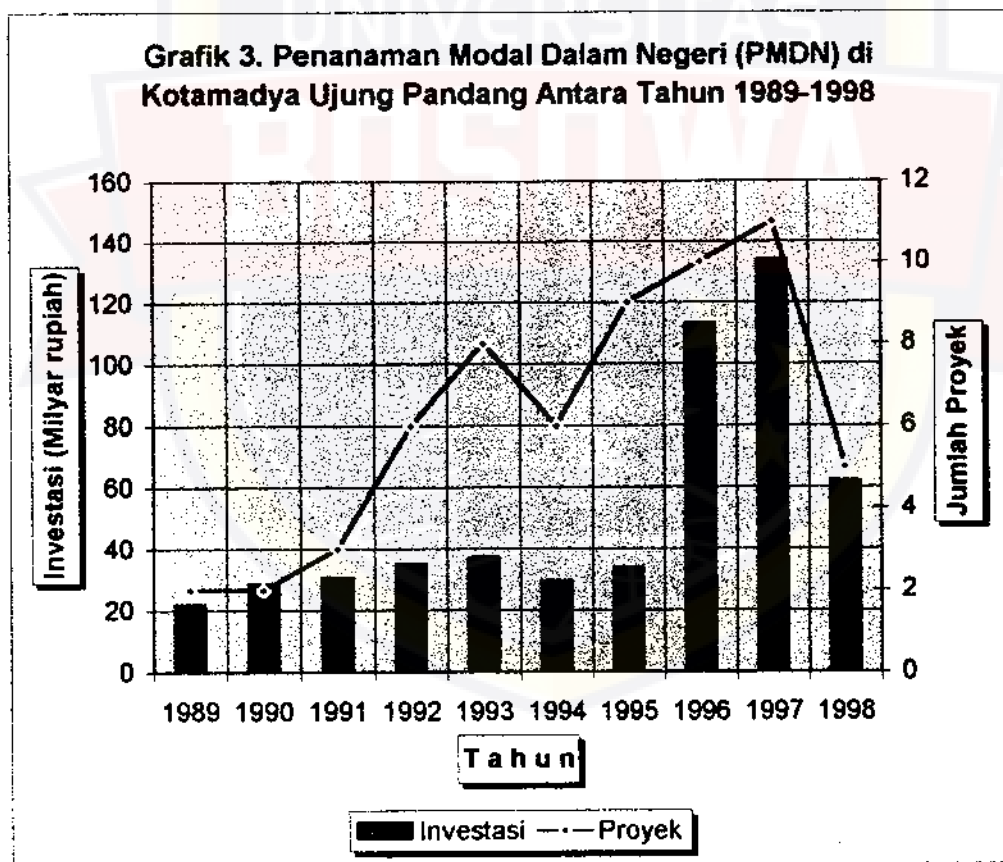
Tabel 10. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989-1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar rupiah)

| No. | Tahun | Kotamadya Ujung Pandang | | | |
|------------------|-------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Proyek | Persentase | Investasi | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1989 | 2 | - | 21.7 | - |
| 2 | 1990 | 2 | 0.00 | 28.3 | 23.08 |
| 3 | 1991 | 3 | 33.33 | 30.4 | 7.14 |
| 4 | 1992 | 6 | 50.00 | 34.8 | 12.50 |
| 5 | 1993 | 8 | 25.00 | 37.0 | 5.94 |
| 6 | 1994 | 6 | -33.33 | 29.3 | -26.38 |
| 7 | 1995 | 9 | 33.33 | 33.8 | 13.33 |
| 8 | 1996 | 10 | 10.00 | 112.9 | 70.11 |
| 9 | 1997 | 11 | 9.09 | 133.9 | 15.67 |
| 10 | 1998 | 5 | -120.00 | 61.8 | -116.61 |
| Jumlah | | 62 | | 523.9 | |
| Rata-rata | | 6.2 | 0.82 | 52.4 | 0.53 |

Sumber Data: Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan.
Data Diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa baik jumlah proyek maupun nilai investasi yang terjadi selama tahun 1989 hingga tahun 1998 di Kotamadya Ujung Pandang, relatif mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan

melihat persentase pertumbuhan jumlah proyek rata-rata pertahunnya sebesar 0,85% atau relisasi proyek yang disetujui pihak Pemda Kotamadya Ujung Pandang berkisar antara 6 - 7 proyek/tahun dengan nilai investasi rata-rata sebesar 52,4 milyar rupiah pertahun. Nilai investasi rata-rata yang ditanamkan di berbagai sektor adalah sekitar 0,53%/tahun.



Melihat kenyataan tersebut merupakan suatu langkah ke arah kemajuan, di mana bukan hanya jumlah penerimaan yang diperoleh Pemda Kotamadya Ujung Pandang semakin besar, tetapi di lain pihak diharapkan juga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin meningkat sehingga pada gilirannya dapat dicapai pemerataan hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik.

Selain proyek yang berstatus PMDN yang beroperasi di Kodya Ujung Pandang, terdapat juga beberapa konsorsium asing yang telah mendapat izin usaha dari pihak pemda tingkat II.

Proyek-proyek PMA yang dimaksud di atas, merupakan penjumlahan-penjumlahan proyek-proyek baru yang dikurangi proyek PMA yang beralih status menjadi PMDN dan proyek PMA yang telah dicabut izin usahanya.

Proyek-proyek PMA tersebut (yang sudah terealisasi) dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 11. Proyek-proyek Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989-1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar rupiah)

| No. | Tahun | Kotamadya Ujung Pandang | | | |
|------------------|-------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Proyek | Persentase | Investasi | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1989 | 1 | - | 23.93 | - |
| 2 | 1990 | 2 | 50.00 | 29.36 | 18.50 |
| 3 | 1991 | 2 | 0.00 | 30.02 | 2.21 |
| 4 | 1992 | 3 | 33.33 | 29.72 | -1.02 |
| 5 | 1993 | 2 | -50.00 | 36.97 | 19.61 |
| 6 | 1994 | 3 | 33.33 | 60.67 | 39.06 |
| 7 | 1995 | 5 | 40.00 | 91.91 | 34.00 |
| 8 | 1996 | 7 | 28.57 | 107.26 | 14.31 |
| 9 | 1997 | 8 | 12.50 | 134.78 | 20.42 |
| 10 | 1998 | 3 | -166.67 | 103.50 | -30.22 |
| Jumlah | | 36 | | 648.11 | |
| Rata-rata | | 3.6 | -2.10 | 64.81 | 12.99 |

Sumber Data: Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan.
Data Diolah.

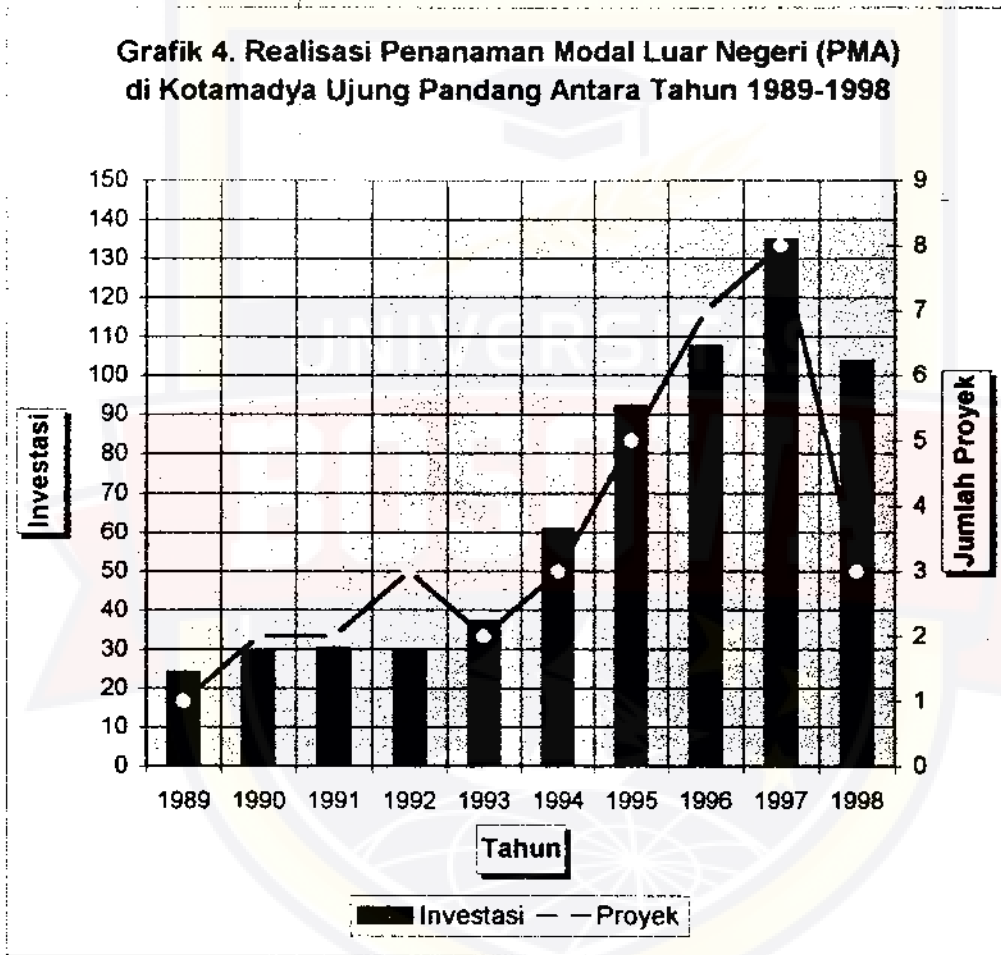
Tabel 11. di atas memperlihatkan bahwa baik jumlah proyek dan nilai investasi yang terealisasi antara tahun 1989 hingga tahun 1997 di Kotamadya Ujung Pandang, relatif juga mengalami peningkatan, Hal ini dapat dinyatakan dengan melihat persentase pertumbuhan jumlah proyek rata-rata pertahunnya

yakni sebesar 18,47%. Tetapi apabila dihitung secara kumulatif mulai dari tahun 1989 sampai 1998, terlihat bahwa pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai -2,10%/tahunnya. Begitupun dengan nilai investasi, apabila didata dari tahun 1989 hingga 1998, nilai investasi yang ditanamkan setiap tahunnya rata-rata 18,39. Tetapi apabila dilihat secara keseluruhan (1989-1998) maka nilai investasi yang ada rata-rata hanya 12,99% pertahunnya.

Hal ini tidak lain adalah karena terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada awal tahun 1998. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah proyek maupun nilai investasi yang terealisasi pada tahun 1989 (lihat tabel 11).

Meskipun demikian, secara keseluruhan dapat dianggap bahwa prospek investasi di Kotamadya Ujung Pandang selama satu dekade terakhir cukup mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.

Di samping data yang ada dalam bentuk tabel, dapat pula dilihat hasil pengolahan data dalam bentuk grafik di bawah ini.



Untuk lebih memperjelas pokok permasalahan yang dibahas, maka di bawah ini disajikan tabel yang merupakan gabungan antara PMDN dan PMA yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang:

Tabel 12. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri (PMDN/PMA) yang Disetujui Pemerintah Tahun 1989-1998 di Kotamadya Ujung Pandang (Milyar rupiah)

| No. | Tahun | Kotamadya Ujung Pandang | | | | Sub Jumlah | |
|--------------|-------|-------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | | PMDN | | PMA | | Proyek | Investasi |
| | | Proyek | Investasi | Proyek | Investasi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 1989 | 2 | 21.70 | 1 | 23.93 | 3 | 45.63 |
| 2 | 1990 | 2 | 28.30 | 2 | 29.36 | 4 | 57.66 |
| 3 | 1991 | 3 | 30.40 | 2 | 30.02 | 5 | 60.42 |
| 4 | 1992 | 6 | 34.80 | 3 | 29.72 | 9 | 64.52 |
| 5 | 1993 | 8 | 37.00 | 2 | 36.97 | 10 | 73.97 |
| 6 | 1994 | 6 | 29.30 | 3 | 60.67 | 9 | 89.97 |
| 7 | 1995 | 9 | 33.80 | 5 | 91.91 | 14 | 125.71 |
| 8 | 1996 | 10 | 112.90 | 7 | 107.26 | 17 | 220.16 |
| 9 | 1997 | 11 | 133.90 | 8 | 134.78 | 19 | 268.68 |
| 10 | 1998 | 5 | 61.80 | 3 | 103.50 | 8 | 165.30 |
| Jumlah Total | | | | | | 98 | 1,172.02 |
| Rata - rata | | | | | | 9.8 | 117.20 |

Sumber Data: Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulawesi Selatan.
Data Diolah.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa gabungan antara investasi PMDN dan PMA yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang selama 10 tahun terakhir memperlihatkan angka yang cukup menggembarakan di mana jumlah proyek secara

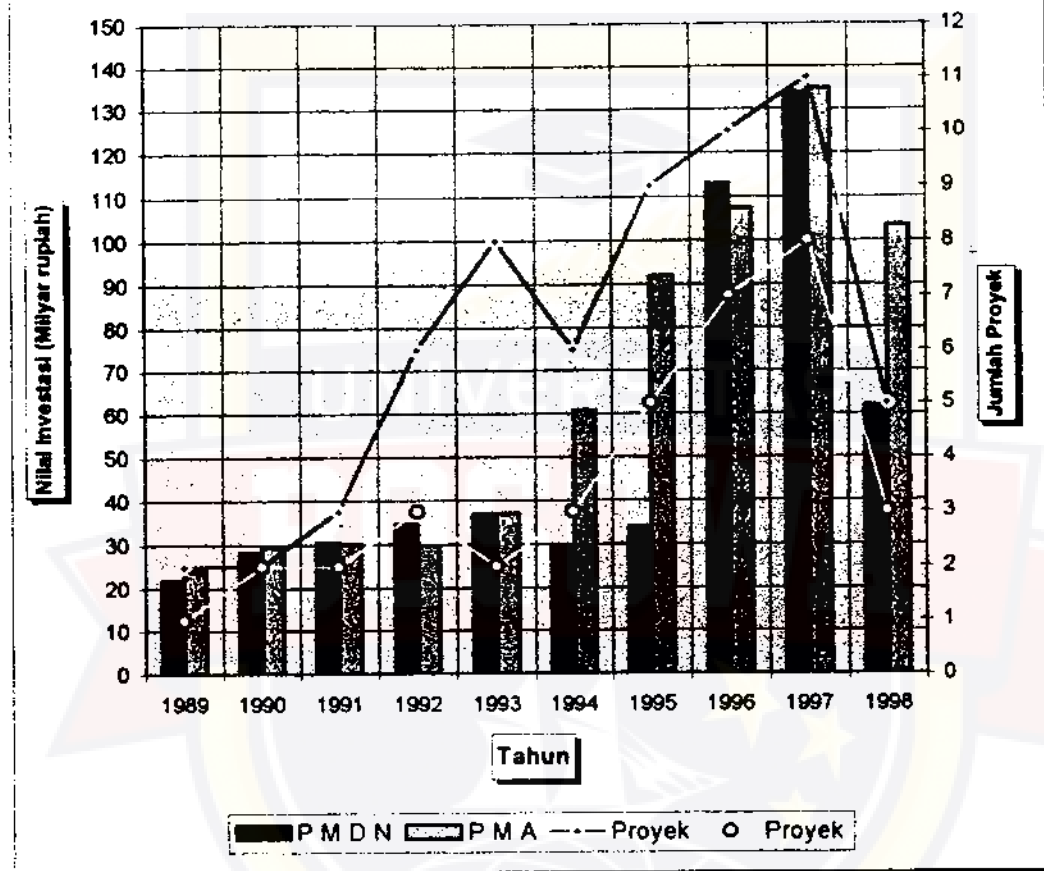
keseluruhan adalah 98 buah dengan 10 buah proyek yang terealisasi pertahunnya adalah antara 10 buah proyek. Sedangkan nilai investasi ke (1989-1998) adalah sebesar 1,2 triliun rupiah dengan rata-rata investasi sebesar 117,20 milyar rupiah pertahunnya.

Apabila disimak maka terlihat bahwa ditinjau dari kuantitas jumlah proyek yang terealisasi maka jumlah proyek PMDN sedikit lebih besar dibandingkan dengan proyek PMA. Tetapi nilai investasi yang ditanamkan pada proyek PMA lebih besar dari investasi PMDN.

Dengan demikian diharapkan iklim investasi yang kondusif perlu tetap dijaga agar investasi yang disalurkan pada sektor-sektor potensial dapat lebih berkembang pada tahun-tahun yang akan datang.

Di bawah ini diperlihatkan grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah proyek dan nilai investasi baik pada proyek PMDN maupun pada proyek PMA.

Grafik 5. Realisasi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri (PMDN/PMA) di Kotamadya Ujung Pandang Antara Tahun 1989-1998



4.4. Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Investasi di Kotamadya Ujung Pandang antara Tahun 1989-1998

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi di Kotamadya Ujung Pandang, maka penulis menggunakan persamaan

analisa regresi linear sederhana dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Di mana :

Y = Tingkat Pertumbuhan Investasi (%).

X = Tingkat suku bunga (%).

a dan b sebagai titik potong dan koefisien regresi merupakan parameter yang ditaksir.

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, telah diketahui bahwa tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi. Artinya apabila suku bunga menaik, maka umumnya investasi mengalami kemunduran. Begitupun apabila suku bunga menurun, biasanya akan diikuti dengan adanya perolehan investasi yang meninggi.

Dengan demikian, untuk mengetahui berapa besar peranan pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap perkembangan investasi di Kotamadya Ujung Pandang periode 1989-1998, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap
Investasi Kotamadya Ujung Pandang
Periode 1989-1998 (Persen)

| TAHUN | X | Y | X ² | Y ² | XY |
|-----------|--------|-------|----------------|----------------|--------|
| 1989 | 11,02 | 2,403 | 121,44 | 5,77 | 26,48 |
| 1990 | 11,18 | 2,462 | 124,99 | 6,06 | 27,52 |
| 1991 | 12,75 | 2,375 | 162,56 | 5,64 | 30,28 |
| 1992 | 12,95 | 2,416 | 167,70 | 5,84 | 31,28 |
| 1993 | 13,93 | 2,412 | 194,04 | 5,82 | 33,57 |
| 1994 | 15,29 | 2,476 | 232,86 | 6,13 | 37,64 |
| 1995 | 15,64 | 2,555 | 244,61 | 6,53 | 40,20 |
| 1996 | 16,71 | 2,672 | 279,22 | 7,14 | 44,67 |
| 1997 | 32,15 | 4,095 | 1033,62 | 16,77 | 131,04 |
| 1998 | 31,83 | 4,053 | 1013,13 | 16,43 | 129,23 |
| Jumlah | 193,23 | 26,52 | 5227,96 | 72,63 | 567,49 |
| Rata-rata | 19,32 | 2,652 | 522,796 | 7,263 | 56,749 |

Sumber Data : Bank Indonesia dan Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Selatan.

Ditanya :

$$\Sigma X = 193,23$$

$$\Sigma Y = 26,52$$

$$\Sigma X^2 = 5227,96$$

$$\Sigma Y^2 = 72,63$$

$$\Sigma XY = 567,49$$

$$X = 19,32$$

$$Y = 2,652$$

Untuk mendapatkan persamaan garis regresinya, maka terlebih dahulu dicari nilai "a" dan "b" dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{(n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y))}{(n(\sum X^2) - (\sum X)^2)} \\
 &= \frac{((19)(507,49) - (190,21)(100,52))}{((19)(5227,96) - (19,38)^2)} \\
 &= \frac{5074,9 - 5124,46}{52279,6 - 579262} \\
 &= \frac{550,44}{51906,33} \\
 &= 0,0106 \times 100\% \\
 &= 1,06\% \\
 a &= Y - bX \\
 &= 2,652 - (0,0106 \times 19,32) \\
 &= 2,652 - 0,204792 \\
 &= 2,45\%
 \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis linear sederhananya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 2,45 + (0,0106 \times 19,32)$$

Dimana :

$$a = 2,45\%$$

adalah tingkat pertumbuhan investasi yang tidak atau diluar pengaruh tingkat suku bunga (variabel X).

$$b = 1,06\%$$

Hal ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan bunga sebesar 1%, maka diperkirakan pertumbuhan investasi akan mengalami perubahan sebesar 2,652%.

Dari hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan investasi di Kotamadya Ujung Pandang selama periode pengamatan, mempunyai pengaruh yang cukup berarti.

Adapun cara untuk mengetahui erat tidaknya hubungan tingkat perkembangan suku bunga terhadap pertumbuhan investasi yang dimaksud, dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$r = \frac{(n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y))}{\sqrt{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} \times \sqrt{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{10(567,49) - (193,23 \times 26,52)}{\sqrt{10(5227,96) - (193,23)^2} \times \sqrt{10(72,63) - (26,52)^2}}$$

$$r = \frac{550,44}{\sqrt{14941,77} \times \sqrt{22,99}}$$

$$= 93,9\%$$

Melihat hasil pengujian, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara laju perubahan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan investasi adalah sebesar 93,9%. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terbalik dengan pertumbuhan investasi yang artinya apabila suatu tingkat suku bunga mengalami perubahan peningkatan/pemulaan, maka dengan sendirinya nilai investasi cenderung akan menurun.

Berikut diuraikan, hingga kurun waktu/periode penelitian, terlihat bahwa perubahan tingkat suku bunga dan pertumbuhan nilai investasi memiliki hubungan yang signifikan. Dengan kata lain, antara perubahan tingkat suku bunga dan nilai investasi mempunyai hubungan yang kuat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.

Dari uraian yang telah dikemukakan dan dijelaskan mulai dari bab pertama sampai bab ke empat. Dapatlah kiranya penulis menarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1989-1998). Laju pertumbuhan investasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2.652% / tahun. sedangkan untuk suku bunga rata-rata adalah sebesar 19.32% / tahun.
2. Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata peranan perubahan suku bunga di Kalimantan Pjung Pandang terhadap pertumbuhan investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan berbanding terbalik. Hal ini dapat dijelaskan secara empiris dengan hasil perhitungan yang menggunakan analisa regresi linear sederhana yaitu, $Y = 2.652 + (-0.1106)X$. Dimana apabila X ini terjadi (kenaikan suku bunga sebesar 1%) akan mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan investasi sekitar 2.652%.
3. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (93.9%) telah membuktikan bahwa perubahan suku bunga mempunyai hubungan yang signifikan terhadap

laju pertumbuhan investasi di Kotamadya Ujung Pandang.

4. Gejala kemerosotan ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1998, sangat berdampak buruk terhadap iklim dan perkembangan investasi yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini terutama disebabkan karena pengaruh internal yang dalam hal ini "serangan" dari dalam negeri yang meliputi antara lain faktor psikologi, faktor moneter misalnya pengaruh tingkat suku bunga yang tidak stabil, gap yang cukup besar antara tabungan dan investasi, defisit neraca transaksi berjalan, lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap beberapa mata uang asing (valas : US\$ dan Ψ Jepang). Secara teoritis, *krisis* ini diperkirakan akan berlangsung antara 3 - 5 tahun. Meskipun demikian, tempo ini bersifat relatif, tergantung tepat tidaknya "obat" yang digunakan sebagai solusi.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapatlah penulis mengajukan

sumbangan pikiran dalam bentuk saran sebagai suatu bahan masukan bagi pihak pengambil keputusan khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang dan instansi-instansi terkait serta pihak otorita moneter dalam mengambil kebijaksanaan guna menunjang perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kotamadya Ujung Pandang pada khususnya.

1. Faktor ketidakstabilan tingkat suku bunga bukanlah satu satunya faktor yang merupakan penyebab kurangnya investasi. Faktor suku bunga hanyalah merupakan salah satu dari elemen-elemen moneter yang ikut memainkan peran dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh inflasi. Sebab apabila terjadi (*hyper inflation, miselnyal*) ini akan sangat berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah yang pada akhirnya akan menyebabkan pergeseran pada angka suku bunga itu sendiri. Oleh karena itu, secara menyeluruh diharapkan agar pihak pemerintah (khususnya Pemerintah Pusat) dapat mengambil tindakan-tindakan *preventif* dalam bentuk kebijaksanaan moneter yang tepat sebelum gejolak perekonomian terjadi.

2. Oleh karena perkembangan investasi merupakan salah satu *barometer* dari pertumbuhan ekonomi secara makro, maka sangat diharapkan adanya kebijaksanaan pemerintah (baik pusat maupun daerah) khususnya yang menyangkut mengenai regulasi dan deregulasi serta debirokratisasi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan fleksibel. Dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, maka pada akhirnya diharapkan hasilnya akan dapat menyentuh langsung pada segenap lapisan sosial masyarakat dan bukan hanya untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu saja.

...

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 1988. Ekonomi Regional, (Bahan Kuliah Universitas Hasanuddin), Ujung Pandang.
- Anonim, 1994. (Garis-garis Besar haluan Negara), Bahan Penataran P-4, BP-7, Jakarta.
- Boediono, 1985. Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Djafar, Syamsuddin, 1993. Ekonomi Moneter (Teori Dasar Kebijakan, Analisis dan Kriteria), Penerbit Kota Kembang, Bandung.
- M. L. Jhingan, 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Cetakan Keempat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nopirin, 1986. Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi Ketiga BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Panitia Istilah Manajemen LPPM, 1987. Kamus Istilah Manajemen, Balai Aksara, Jakarta.
- Reksoprayitna, Soediyono, 1994. Ekonomi Makro (Pengantar Analisa Pendapatan Nasional), Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sukirno Sadono, 1994. Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supranto, J. 1994. Statistik (Teori dan Aplikasi). Edisi kelima, Jilid Dua, Penerbit Erlangga, Jakarta.